

Signifikansi Otoritarianisme dalam Film Adaptasi Puisi Wiji Thukul *Istirahatlah Kata-Kata*

Nahla Faizah; Rouli Esther Pasaribu
Departemen Ilmu Susastra, Universitas Indonesia
adhimah.nahla@yahoo.de ; rouliesther@gmail.com

Abstract

Suharto's totalitarian tendency to lead the New Order government resulted in the closure of the aspirations of the Indonesian people to the government. Various kinds of protests were attempted, one of which was through literary works. One of the writers who helped fight for democracy through poetry was Wiji Thukul. This article discusses the study of the adaptation of Wiji Thukul's poetry and the film adaptation with the title "Rest the words with the meaning of the ideology of authoritarianism. The theory used is the adaptation theory of Linda Hutcheon (2006), and Swolik's authoritarianism (2012). The results show that in contrast to Wiji Thukul's original poem, which presents criticism of the New Order openly, the film *Rests the Words* displays the implicit or covert significance of the authoritarianism of the New Order regime.

Keywords: *Authoritarianism; Wiji Thukul; adaptation, orde baru, istirahatlah kata-kata.*

Intisari

Kecenderungan Soeharto yang totaliter dalam memimpin pemerintahan Orde Baru mengakibatkan tertutupnya aspirasi rakyat Indonesia terhadap pemerintah. Berbagai macam protes diupayakan, salah satunya melalui karya sastra. Salah satu sastrawan yang turut memperjuangkan demokrasi melalui sajak-sajak ialah Wiji Thukul. Artikel ini membahas kajian adaptasi puisi Wiji Thukul dan film adaptasinya dengan judul *istirahatlah kata-kata* dengan pemaknaan ideologi otoritarianisme. Teori yang digunakan adalah teori adaptasi Linda Hutcheon (2006), serta otoritarianisme oleh Swolik (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbeda dengan puisi asli Wiji Thukul yang menampilkan kritik terhadap Orde Baru secara terang-terangan, film *Istirahatlah Kata-Kata* menampilkan signifikansi otoritarianisme rezim Orde Baru secara implisit atau terselubung.

Kata kunci: Otoritarianisme; Wiji Thukul; adaptasi, orde baru, *Istirahatlah Kata-Kata*.

Pendahuluan

Dominasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru sudah menjadi rahasia umum bagi rakyat Indonesia, di mana pada masa tersebut Soeharto dinilai memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung bersifat militeristik dan represif. Rezim Orde baru memandang bahwa pemerintahan yang kokoh dan berusaha tampil dalam usaha-usaha pembangunan nasional merupakan suatu tujuan yang utama (Harry Tjan Silalahi, 1990:12 dalam Hadi & Kasuma 2012). Akan tetapi, hal tersebut mengakibatkan adanya dominasi pemerintahan yang dinilai terlalu kuat (Hadi & Kasuma, 2012) yang terlihat dari "monoloyalitas" yang kerap disisipkan pada aparat birokrasi serta pegawai negeri agar senantiasa terus mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Upaya pelanggaran kekuasaan rezim Soeharto selama 32 tahun antara lain dengan dilakukannya propaganda. Rezim tersebut seringkali memanfaatkan media massa agar propaganda yang akan disampaikan dapat menyebar ke berbagai kalangan masyarakat. Saluran televisi serta surat kabar juga secara ‘terpaksa’ menjadi corong pemerintah Orde Baru sebagai media propaganda. Bahkan, pemerintah memegang kontrol penuh atas segala bentuk pengawasan terhadap aktivitas penyiaran, baik pada media elektronik maupun media cetak.

Kecenderungan Soeharto yang totaliter dalam memimpin mengakibatkan tertutupnya aspirasi rakyat Indonesia untuk dapat didengar oleh pemerintah. Berbagai macam protes diupayakan agar aspirasi yang disampaikan dapat didengar oleh pemerintah, salah satunya melalui karya sastra. Karya sastra dalam kehidupan manusia tidak hanya bersifat menghibur, tetapi juga dapat memberikan “pencerahan jiwa” (Hanugrah dan Hardi, 2019). Selain itu, karya sastra juga merupakan sebuah refleksi terhadap fenomena sosial budaya dan dalam beberapa kesempatan aspek kesejarahan juga hadir tidak hanya sebagai penghias untuk menjadikan cerita tersebut menarik, melainkan juga ikut berperan dalam merekonstruksi sejarah (Hanugrah dan Hadi, 2019).

Karya-karya sastra yang merefleksikan penyimpangan politik pada masa Orde Baru antara lain adalah karya Ahmad Tohari “Orang-orang Proyek” yang mengangkat idealisme serta mengkritisi zaman pemerintahan Orde Baru pada masa 1980-1990. Selain itu, novel “Waspirin dan Satinah” karya Kuntowijoyo juga menampilkan penceritaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Rezim yang kerap membungkam opini dan mengaku sebagai oposisi komunisme ini juga mendiskriminasi sastrawan termasyhur di Indonesia, yakni Pramoedya Ananta Toer dengan karya-karyanya yang terkenal, yakni “Tetralogi Pulau Buru”. Buku-bukunya terpaksa dibakar oleh militer dan karyanya tersebut dilarang untuk dibaca, seperti misalnya “Bumi Manusia”. Pram merupakan salah satu sastrawan yang turut serta memperjuangkan kebebasan demokrasi di Indonesia. Senada dengan Pram, tampaknya rakyat Indonesia tidak asing lagi dengan perjuangan WS Rendra, seorang seniman dan budayawan yang memperjuangkan demokrasi melalui sajak-sajaknya. Akibatnya, ia seringkali diteror dengan tuduhan mengancam keamanan nasional. Sastrawan lainnya yang juga memperjuangkan demokrasi melalui sajak-sajak ialah Wiji Thukul, seorang seniman rakyat yang sangat kuat bentuk kritiknya terhadap dominasi kuasa rezim Orde Baru pada masa itu. Sajak-sajaknya yang sangat populer dan seringkali hadir dalam aksi demokrasi adalah “Peringatan”, “Sajak Suara” dan “Bunga dan Tembok”. Akibat dari keaktifannya dalam mengkritisi rezim Orde Baru yang bersifat represif serta memperjuangkan

demokrasi dan kebebasan berpendapat, Wiji Thukul akhirnya diburu oleh pemerintah Orde Baru dan kabur sehingga menjadi seorang “Buron”. Dalam pelariannya inilah lahir sebuah puisi dengan judul “Istirahatlah Kata-Kata”, sebuah puisi yang sarat akan makna pengistirahatan kata-kata yang hampir kalah dalam pertarungan kebebasan berpendapat.

Pada tahun 2017, sembilan belas tahun pascajatuhnya rezim Soeharto, Yosep Anggi Noen mengadaptasi puisi Wiji Thukul ke dalam sebuah film layar lebar dengan judul yang sama, yakni “Istirahatlah Kata-Kata”. Film ini dirilis secara terbatas dan dibuat untuk mengkritik kentalnya budaya militer Orde Baru yang tercermin pada masa pelarian Wiji Thukul saat menjadi “buron” rezim Orde Baru. Uniknyanya, film ini diadaptasi menjadi sebuah film biopik yang mendeskripsikan bagaimana perjalanan Wiji Thukul ketika pergi mengasingkan diri ke pulau Kalimantan. Film ini meminjam salah satu judul puisi yang ditulis oleh Wiji Thukul, yakni “Istirahatlah Kata-Kata”. Akan tetapi, film biopik ini menceritakan perjalanan Wiji Thukul dengan menarasikan puisi-puisi Wiji Thukul yang lain, seperti puisi “Tanpa Judul”, “Kemerdekaan”, “Apa Guna”, dan lain sebagainya. Rangkaian puisi-puisi tersebutlah yang memberi makna terhadap resistensi Otoritarianisme seorang Wiji Thukul yang ditampilkan dalam film.

Penelitian yang meneliti otoritarianisme rezim Orde Baru telah beberapa kali dilakukan. Hadi & Kasuma (2012) berpendapat bahwa secara garis besar rezim Orde Baru mampu memaksakan rakyat untuk patuh dan tunduk terhadap segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Cara yang digunakan untuk ‘memaksa rakyat’ disebut juga dengan tindakan represif. Umumnya, dalam menginternalisasi kebijakan pemerintahan pada rakyat, pemerintah orde baru menggunakan media propaganda.

Sudah banyak juga penelitian yang menjadikan puisi-puisi Wiji Thukul sebagai korpus penelitian, antara lainnya yang dilakukan oleh (Ramdani, Martian & Wuryani, 2018) yang meneliti makna puisi Wiji Thukul yang berjudul “Peringatan”, (Putra, 2018) yang meneliti puisi “Tanpa Judul” serta Hamzah (2019) yang meneliti puisi-puisi Wiji Thukul yang ditampilkan dalam film *Istirahatlah Kata-Kata*. Ketiga penelitian tersebut berorientasi pada pemaknaan puisi utamanya melalui segi struktur puisi dan menyimpulkan bahwa puisi-puisi Wiji Thukul mencerminkan perjuangan serta kritik sosial yang ditujukan pada rezim Orde Baru.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang terfokus pada pemaknaan puisi yang dianalisis melalui struktur, penelitian ini bertujuan untuk membongkar sekaligus puisi Wiji Thukul dan film adaptasinya dengan judul “Istirahatlah kata-kata” dengan mengangkat isu signifikansi otoritarianisme yang ditampilkan dalam dua wahana yang berbeda tersebut.

Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat diangkat oleh penulis dalam artikel ini adalah: Bagaimana film dan puisi “Istirahatlah Kata-Kata” secara tekstual berbeda dalam menampilkan otoritarianisme rezim orde baru melalui penggunaan latar sosial?

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan pada artikel ini adalah metode pembacaan dekat atau *close reading*. Allen (2017) menyatakan bahwa *close reading* atau analisis tekstual berfungsi untuk menyelidiki hubungan internal wacana untuk menemukan apa yang membuat teks tersebut berfungsi secara persuasif. Menurut Allen (2017) sebuah teks merupakan artefak yang merangsang makna. Untuk menyimpulkan makna tersebut, dibutuhkan pembacaan yang cermat. Pertama, analisis terhadap struktur teks film dilakukan dengan cara membuat mikro sekuen dan mencatat peristiwa-peristiwa penting dengan mempertimbangkan aspek naratif dan sinematografis film. Pembuatan mikro sekuen dilakukan untuk melihat bagaimana film “Istirahatlah Kata-Kata” merepresentasikan persoalan ideologi otoritarianisme dengan berlandaskan puisi-puisi dari Wiji Thukul. Kedua, penulis mengkaji perbedaan pemaknaan yang dihadirkan melalui puisi-puisi Wji Thukul serta film “Istirahatlah Kata-Kata” dengan berfokus pada perbedaan latar sosial yang dihadirkan dalam film. Ketiga, penelitian ditutup dengan penyimpulan dari analisis-analisis yang telah dipaparkan pada beberapa bagian sebelumnya.

Dalam penelitian ini, puisi-puisi Wiji Thukul dan film “Istirahatlah Kata-Kata” merupakan sumber data primer yang akan dianalisis menggunakan kajian adaptasi dengan pemaknaan ideologi otoritarianisme. Svulik (2012:22-23) menyatakan bahwa “*an authoritarian government lacks free and competitive direct elections to legislatures, free and competitive direct or indirect elections for executives, or both.*” Pemerintahan otoriter tidak memiliki sistem pemilihan langsung yang bebas dan kompetitif baik untuk legislatif maupun eksekutif. Secara luas, negara yang otoriter merupakan negara yang tidak memiliki kebebasan sipil, atau negara di mana pemerintah dan oposisi tidak bergantian berkuasa setidaknya sekali setelah pemilihan umum yang bebas.

Dalam mengkaji kedua teks primer, penulis menggunakan teori adaptasi yang dikemukakan oleh Linda Hutcheon (2006). Adaptasi menurutnya adalah “*An openly acknowledged and extended reworking of particular other texts, adaptations are often compared to translations. Just as there is no such thing as a literal translation, there can be no literal adaptation* (Hutcheon 2006:18 dalam Andharani & Pasaribu, 2019). Adaptasi

menurut Hutcheon tidak sebanding dengan menerjemahkan suatu karya. Artinya, dalam mengadaptasi sebuah karya pastinya akan terdapat perbedaan dengan karya aslinya, baik dari bentuk, pemaknaan ideologi, dan pendeskripsian ulang karakter tokoh, meskipun dari segi alur cerita seringkali terdapat kesamaan. Hutcheon menggunakan kerangka berpikir pertanyaan 5W1H dalam memaknai karya adaptasi, yakni (*what, when, where, who, how*). *What* mempertanyakan apa karya yang diadaptasi serta pola adaptasi apa yang digunakan, *who* merupakan pertanyaan untuk melihat siapa yang mengadaptasi dan bagaimana latar belakang pemikiran mereka, *why* Merupakan alasan di balik seorang adaptor mengadaptasi karya tersebut dibandingkan membuat suatu karya mandiri yang baru, misalnya adanya suatu pandangan politik tertentu yang memengaruhi, *how* Merupakan pertanyaan perihal bagaimana resepsi penonton terhadap karya adaptasi tersebut, *when* mempertanyakan waktu dibuatnya sebuah karya adaptasi, sebab suatu karya pasti memiliki hubungan dengan fenomena yang terjadi pada masa itu, sedangkan *where* berkaitan dengan ruang kehadiran karya itu sendiri agar terdapat relevansi isu dengan target konsumen tertentu. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab pertanyaan *what, why, who, when* dan *where*. Pertanyaan *what* dan *why* digunakan untuk menganalisis perbedaan mendasar yang terjadi dalam puisi dan film dan mengapa terjadi perbedaan tersebut. *Who, when* dan *where* digunakan untuk menganalisis konteks waktu dan tempat dipublikasikannya karya adaptasi ini.

Hasil dan Pembahasan

Membandingkan Kedua Teks: Puisi-Puisi Wiji Thukul dan Film Biopik “Istirahatlah Kata-Kata”

Struktur alur naratif dalam film adaptasi *Istirahatlah Kata Kata* dapat dibagi menjadi tiga tahapan: (1) penjelasan mengenai alasan di balik persembunyian Wiji Thukul, (2) perjalanan Wiji Thukul dalam mencari tempat persembunyian, dan (3) kepulangan Wiji Thukul ke kampung halaman. Perbedaan pemaknaan diskursus otoritarianisme dalam film dapat dilihat melalui representasi penokohan Wiji Thukul dan relasi kuasa antara militer Indonesia dan rakyat sipil. Aspek sinematografis serta sonor yang dihadirkan pada film menampilkan citra Otoritarianisme rezim Suharto secara implisit dengan dipilihnya kehidupan rakyat sipil di pedesaan sebagai latar suasana.

1. Representasi Penokohan Wiji Thukul di Masa Pelarian

Film adaptasi ini mengambil latar waktu dan tempat di mana Wiji Thukul menjadi seorang buron untuk menghindari dari kejaran rezim Orde Baru. Ia menjadi buruan pemerintah karena peristiwa pendeklarasian PRD (Partai Rakyat Demokratik yang dianggap bertentangan dengan aturan resmi di Indonesia yang hanya memiliki tiga partai politik resmi pada saat itu. Tanggal 27 Juli 1996, pecah kerusuhan di Jakarta. Rezim Soeharto menuduh PRD terlibat dalam usaha menggulingkan pemerintahan. Wiji Thukul dianggap terlibat pada organisasi partai yang dianggap illegal oleh pemerintah orde baru saat itu. Partai yang membawa nama Wiji Thukul tersebut dituduh sebagai organisasi yang ingin mengukudeta pemerintah Orde Baru. Film ini memaknai puisi-puisi Wiji Thukul melalui rangkaian peristiwa yang dialami oleh Wiji Thukul dalam masa pelariannya di Pontianak. Setibanya di persembunyian pertama, Wiji beristirahat di sebuah kamar di rumah kerabatnya. Ia masuk ke dalam kamar tersebut dan kemudian duduk sambil termenung. Adegan tersebut kemudian diiringi dengan suara hati Wiji Thukul yang sedang membaca puisinya yang berjudul “Istirahatlah Kata-Kata”.

Versi Film

Istirahatlah kata-kata
Jangan menyembur-nyembur
Orang-orang bisu
Kembalilah ke dalam Rahim
Segala tangis dan kebusukan
Dalam sunyi meringis
Tempat orang mengikari
Menahan ucapannya sendiri
Tidurlah kata-kata
Kita bangkit nanti

Versi Puisi Asli

Istirahatlah kata-kata
Jangan menyembur-nyembur
Orang-orang bisu
Kembalilah ke dalam Rahim
Segala tangis dan kebusukan
Dalam sunyi meringis
Tempat orang mengikari
Menahan ucapannya sendiri
Tidurlah kata-kata
Kita bangkit nanti
Menghimpun tuntutan-tuntutan
Yang miskin papa dan dihancurkan
Nanti kita akan mengucapkan

Bersama tindakan
Bikin perhitungan

Puisi yang diartikulasikan oleh Wiji Thukul di dalam film adaptasi mengalami reduksi bait sehingga sedikit mengubah makna puisi tersebut. Versi puisi asli mengungkapkan bahwa setelah mengistirahatkan kata-kata, Wiji Thukul memiliki semangat untuk bangkit di kemudian hari bersama dengan tindakan untuk melawan rezim Orde Baru. Akan tetapi, dalam versi film, puisi tersebut tidak menyertakan larik “*menghimpun tuntutan-tuntutan / yang miskin papa dihancurkan / nanti kita akan mengucapkan / bersama tindakan, bikin perhitungan /*. Diksi-diksi yang menyiratkan perjuangan untuk bertindak dan bernada ancaman serta kritik bagi pemerintahan pada saat itu justru dihilangkan. Kemudian, pembacaan puisi tersebut di dalam film juga didukung dengan sonor keheningan yang menambah kesan sunyi sepi tanpa adanya semangat untuk berucap kembali. Film adaptasi tidak merepresentasikan semangat Wiji Thukul untuk bangkit kembali di kemudian hari bersama dengan tindakan untuk memperjuangkan kebebasan demokrasi dan menampilkan kritik Wiji Thukul yang sesungguhnya hadir di dalam puisinya.

Di dalam film, Wiji Thukul ditampilkan sebagai karakter yang mengkritik rezim Orde Baru secara diam-diam dengan cara menjelek-jelekan rezim tersebut dengan beberapa kerabat seperjuangannya yang juga sedang bermasalah dengan pemerintahan pada saat itu. Hal ini tercermin melalui dialog Wiji Thukul dengan temannya sebagai berikut.

Teman Wiji Thukul: “Budiman ditangkap, Ji. Diintimidasi.”

Wiji Thukul : “Rezim ini kan bangsat. Main dor, dor, dor, tanpa pengadilan” (menit ke 00.07.44-00.08.04)

Selain memperlihatkan menunjukkan kegeraman Wiji Thukul terhadap pemerintahan Orde Baru, percakapan ini juga mengungkap secara eksplisit kekuatan militer Orde Baru sebagai tangan kanan pemerintah langsung yang sudah biasa menembaki orang tanpa melalui pengadilan yang resmi. Individu yang terlibat pada satu hal yang bertentangan oleh pemerintah akan langsung ditembak. Sebagai mana dikemukakan oleh Svolik (2012, hlm. 20), “*authoritarian states include countries that lack the civil liberties*”. Tidak ada kebebasan yang diperoleh oleh rakyat sipil, dalam konteks film ini adalah kebebasan berdemokrasi yang sangat dibatasi oleh pemerintah pada masa tersebut. Perkataan Wiji Thukul yang menyebutkan bahwa “*rezim ini bangsat*” di rumah kerabatnya pada masa pelarian merepresentasikan cara Wiji Thukul menyampaikan penilaiannya terhadap pemerintah pada masa tersebut secara sembunyi-

sembunyi. Hal ini juga didukung oleh dialog Wiji Thukul dengan kerabatnya, Martin ketika sedang berada di kedai kopi. Kejadian ini terjadi sesaat setelah Wiji Thukul mengubah identitasnya menjadi Paul. Wiji Thukul bercerita bahwa ia memiliki puisi tentang “*tahi*”.

“*Kemerdekaan itu nasi
Dimakan jadi Tahi!*”

Puisi ini diucapkan di dalam percakapan pribadi Wiji Thukul dan kerabatnya, Martin dan Markus. Padahal, jika dikaitkan dengan asal-usul puisi ini, puisi *Kemerdekaan* lahir pada tahun 1982 di momen perayaan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia. Puisi ini merupakan kritik *blak-blakan* Wiji Thukul di depan masyarakat banyak yang mengkritisi kemerdekaan yang terjadi di negeri ini hingga harus membuatnya berurusan dengan aparat kepolisian. Namun, makna kritik tersebut seolah disembunyikan di dalam film dan hanya ditampilkan sebagai bentuk obrolan intim Wiji Thukul dengan dua kerabatnya, Martin dan Thomas. Makna puisi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan yang ditampilkan dalam film seperti disembunyikan, dan sekaligus mengimplisitkan karakter Wiji Thukul sebagai seorang tokoh yang revolusioner dan berani berbicara. Meskipun begitu, perbedaan bentuk kritik tersebut seolah ingin menawarkan bentuk perjuangan seorang Wiji Thukul dengan perspektif berbeda, yakni dengan menampilkan adanya kefrustrasian seorang individu yang harus menahan segala bentuk aksinya karena sedang menjadi buron pemerintah dan berpotensi akan meninggal di tempat ketika ia ditangkap. Dengan kata lain, hal ini semakin memperkuat karakterisasi Wiji Thukul sebagai tokoh *subaltern* yang hadir akibat represi dari pemerintah Orde Baru.

Subalternitas tokoh Wiji Thukul juga terlihat pada peristiwa di mana Wiji Thukul berkhayal sedang berorasi menjadi pimpinan aksi demonstrasi 14.000 buruh pekerja tekstil.

Gambar. 1 Khayalan Wiji Thukul



Pada gambar ini, terlihat bahwa di belakang Wiji Thukul alias Paul terdapat *background* kerumunan massa yang seolah sedang dipimpin aksinya oleh Wiji Thukul. Akan tetapi, ternyata orasi yang disampaikan hanyalah sebuah khayalan sebagai luapan kekesalan seorang tokoh yang dimarjinalkan oleh rezim. Lagi-lagi, film ini melepaskan pencitraan Wiji Thukul sebagai karakter yang berani dan pintar memimpin demokrasi. Film ini merepresentasikan karakter Wiji Thukul sebagai seorang *subaltern* yang dibungkam suaranya dan tak memiliki

media untuk mengungkapkan kritiknya terhadap pemerintah saat itu. Akan tetapi, khayalan ini tidaklah lepas dari harapan yang datang dari pikiran seorang Wiji Thukul yang memang gemar berdemonstrasi dan membela rakyat-rakyat kecil yang tertindas. Hanya saja, film ini memvisualisasikan karakter Wiji Thukul tersebut melalui imajinasi Wiji Thukul.

Semangat tokoh Wiji Thukul untuk bangkit dan melawan juga ditampilkan secara implisit melalui adegan kepulangannya ke rumah istrinya, Sipon. Sesampainya di rumah, Wiji Thukul ditampilkan begitu pasrah dan tidak ditampilkan memiliki semangat yang membara untuk bangkit dan berjuang kembali di kemudian hari. Hal ini tercermin melalui penampilan adaptasi puisi Wiji Thukul yang berjudul *Bunga dan Tembok* yang telah diadaptasi kembali menjadi sebuah lagu. Puisi *Bunga dan Tembok* yang ditampilkan dalam film memotong beberapa larik puisi versi aslinya sebagai berikut:

Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang tak
Kau hendaki tumbuh
Engkau lebih suka membangun
Rumah dan merampas tanah
Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang tak
Kau kehendaki adanya
Engkau lebih suka membangun
Jalan raya dan pagar besi
Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang
Dirontokkan di bumi kami sendiri
Jika kami bunga
Engkau adalah tembok itu
Tapi di tubuh tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan: engkau harus hancur!
Dalam keyakinan kami
Di mana pun – tirani harus tumbang!

Di dalam adaptasi, puisi ini mengiringi kepergian Wiji Thukul setelah sesaat pulang ke rumahnya untuk melepas rindu dengan istrinya Sipon dan anak-anaknya. Akan tetapi pada versi adaptasi, tiga bait terakhir tidak diikutsertakan di dalam film. padahal, tiga bait terakhir tersebut secara eksplisit menyuarakan ancaman sekaligus semangat karakter Wiji Thukul yang ingin sekali mengumpulkan kekuatan rakyat untuk menumbangkan sistem pemerintahan tirani yang cenderung berperilaku semena-mena terhadap rakyatnya. Di dalam film, bait yang

ditampilkan hanyalah bagian di mana Wiji Thukul terkesan menerima bahwa sosoknya ibarat bunga yang tak dikehendaki keberadaannya oleh pemerintah pada masa itu, tanpa menampilkan adanya semangat untuk menumbangkan rezim tersebut sehingga penggambaran rezim Orde Baru yang bersifat otoriter ditampilkan lebih terselubung melalui penghilangan diksi-diksi tersebut.

Sebagai representasi dari seorang *subaltern*, Wiji Thukul di dalam adaptasi juga ditampilkan tidak memiliki aktivitas keseharian yang berarti yang benar-benar merepresentasikan sosok Wiji Thukul yang sangat revolusioner di masa Orde Baru. Tidak ada adegan *flashback* misalnya yang dapat menampilkan perjuangan perlawanan yang pernah sosok Wiji Thukul lakukan dalam memperjuangkan demokrasi, mengingat dirinya yang pernah dianugerahi penghargaan “*Yap Thiam Hien*” sebagai orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Film ini justru menampilkan banyak adegan keseharian Wiji Thukul, seperti memijat Thomas (kerabatnya), tertidur di bawah tangga, dan lagi-lagi semua aktivitas Wiji Thukul didukung oleh dominasi sonor alamiah (suara jangkrik, aliran sungai) yang mendukung kehampaan hidup Wiji Thukul.

2. Relasi Kuasa Militer dan Rakyat Sipil

Rezim yang otoriter cenderung memiliki kekuatan militeristik yang sangat tinggi. Ezrow & Frantz (2011, hlm. 17) serta Lai & Slater (2006) mendefinisikan bahwa “*authoritarian regimes may be either autocratic or oligarchic in nature and may be based upon the rule of a party or the military*”. Otoritarianisme rezim Orde Baru yang berorientasi pada kekuatan militeristik tercermin melalui adegan ketika Wiji Thukul dan kerabatnya, Thomas bertemu dengan Udi (seorang tentara militer). Pada adegan tersebut, Wiji Thukul memperkenalkan diri sebagai “Wanto” untuk menyamarkan identitasnya. Ketika dimintai kartu identitas oleh Udi, Wiji Thukul tidak dapat menyanggupinya sehingga tentara tersebut kemudian berkata “*untung aku gak bawa pistol. Aku bisa dorr kamu!*”. Dialog tentara tersebut mengisyaratkan adanya otoritas militer untuk membunuh rakyat sipil karena permasalahan tertentu, atau perilaku rakyat sipil yang sedikit bertentangan dengan konstitusi negara tanpa memperhatikan hak untuk hidup manusia

Peristiwa lain yang mencerminkan militeristik Orde Baru juga terlihat pada adegan ketika Wiji Thukul pergi ke tukang cukur dan bertemu dengan seorang tentara senior. Ketika tentara senior tersebut datang, Wiji Thukul yang sedang berada di gilirannya harus mengalah dan didului oleh tentara tersebut. Terlihat sekali adanya stratifikasi sosial di mana tentara atau militer harus dihormati, disegani dan didahului haknya dibanding rakyat sipil. Selain

ditampilkan mengalah, Wiji Thukul juga terlihat menunduk dan terkesan menyembunyikan wajahnya karena takut dikenali oleh tentara tersebut sebab statusnya yang sedang menjadi buron pemerintah Orde Baru. Kemudian tentara itu berdialog dengan seorang tukang cukur sebagai berikut:

“Waktu di Jogja, pas ada petrus. Semua preman didor (ditembak) , pokoknya yang bertato didor. Semua preman memang tidak ada gunanya. Tapi itu politik, supaya rakyat takut sama aparat hukum. (menit ke: 43.19-43.31)

Militer adalah kekuatan dari Rezim Orde Baru dan sangat ditakuti karena ia adalah tangan kanan presiden Soeharto. Film ini menampilkan dengan jelas relasi kuasa antara pihak militer dengan rakyat sipil melalui adegan Paul (Wiji Thukul) yang menyerahkan gilirannya untuk dicukur kepada tentara tersebut yang semakin memperlihatkan otoritas militeristik yang ada pada masa itu. Akan tetapi, Wiji Thukul yang terkenal lantang dalam menyuarakan pendapatnya yang tercermin melalui puisi-puisinya hanya terdiam mendengar ucapan tersebut, bak sedang ‘beristirahat’ atau tak punya kuasa lagi untuk melawan padahal jelas-jelas rakyat sipil sedang dimarjinalkan oleh tentara senior tersebut.

Bentuk resistensi terhadap militer Orde Baru yang represif ditampilkan sangat jelas di puisi versi asli Wiji Thukul yang berjudul “*Apa Guna*”.

Di mana-mana moncong senjata
Berdiri gagah
Kongkalikong
Dengan kaum cukong
Di desa-desa rakyat dipaksa
Menjual tanah
Tapi, tapi, tapi, tapi
Dengan harga murah
Apa guna punya ilmu tinggi
Kalau hanya untuk mengibuli
Apa gun abaca banyak buku
Kalau mulut kau bungkam melulu

Puisi ini merupakan kritik yang disampaikan oleh Wiji Thukul terhadap otoritas militer yang selalu mengandalkan senjatanya untuk menyerang aspirasi rakyat. Hal tersebut tercermin dari diksi yang ditampilkan *di mana mana moncong senjata / berdiri gagah / kongkalikong / dengan kaum cukong /*. Akan tetapi, puisi yang menggambarkan kekejaman militer ini dilesapkan dalam film dengan tidak menampilkan larik-larik tersebut sehingga perspektif Wiji Thukul dalam memandang militer pada saat itu terkesan samar-samar. Puisi “*Apa Guna*” yang

ditampilkan dalam film hanya sebatas pada larik “*Apa guna baca banyak buku / kalau mulut kau bungkam melulu*”.

Subjek dan Konteks

Adanya perubahan representasi signifikansi otoritarianisme melalui penokohan Wiji Thukul di dalam film sejalan dengan perspektif pembuat film adaptasi tersebut, serta meninjau perkembangan yang ada pada pemerintahan ketika film ini diadaptasi, karakteristik masyarakat, serta diskursus yang sedang berkembang pada era reformasi ini.

1. Perspektif Sutradara akan Otoritarianisme Orde Baru

Upaya mengimplisitkan representasi Otoritarianisme rezim Orde Baru dan menampilkan tokoh Wiji Thukul sebagai seorang subaltern merupakan cara sutradara untuk menampilkan adanya ironi. Ironi yang dimaksud adalah bagaimana seorang Wiji Thukul sebagai tokoh yang dikenal banyak melakukan kritik secara terang-terangan terhadap pemerintah melalui puisinya justru direpresentasikan sebagai individu yang penakut dan seolah bungkam. Representasi karakter Wiji Thukul tersebut menunjukkan adanya kefrustrasian yang datang akibat rezim yang otoriter tersebut sehingga memunculkan karakterisasi seorang tokoh yang revolusioner menjadi karakter yang diam seribu Bahasa. Kefrustrasian, kebungkaman, represi yang disamarkan tentu saja sangat jauh dari ekspektasi penonton yang mengharapkan adanya representasi tokoh Wiji Thukul sebagai sosok yang penuh semangat dan berani melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, upaya *mendowngrade* karakterisasi tokoh tersebut tidak lepas dari filosofi hidup sang sutradara Yosep Anggi Noen sebagai seorang Jawa yang memiliki prinsip “*semakin samar semakin jelas terlihat*”. Hal ini terlihat melalui kutipan berikut yang diperoleh melalui wawancaranya pada tahun 2017:

“Saya dibesarkan pada sebuah tradisi yang tidak selalu serba terbuka. Jawa itu kan lebih banyak menyimpan. Sinema menjadi rupa saya untuk mentransformasi spirit. Apa ya? Spirit menjadi orang Jawa yang tidak mengumbar.” (Noen, 2017).

Puisi-puisi Wiji Thukul yang ditulis pada tahun yang berbeda-beda dalam film ini ditampilkan menjadi ‘satu masa pelarian’ Wiji Thukul. Menurut Yosep, hal tersebut ia lakukan dengan cara menyeleksi puisi-puisi Wiji Thukul yang menurutnya dapat dihadirkan kembali secara kontekstual sesuai dengan zaman ketika film adaptasi ini dibuat. Yosep ingin menunjukkan bahwa sisi negatif dari pemerintahan otoriter tidak harus selalu ditampilkan dalam bentuk adegan kekerasan, tetapi juga dapat dihadirkan melalui bentuk estetika lain yang

diibaratkan dengan efek ‘panoptikon’, yakni masa di mana kita merasa selalu diawasi langkah pergerakan kita tanpa ada wujud orang yang mengawasi tersebut. Itu juga merupakan sebuah bentuk kekerasan dalam wujud batin seseorang.

“Orang yang sudah kalap duluan mendengar film tentang Wiji Thukul pasti mengira film ini bakal tentang para aktivis dan kekerasan yang menimpa mereka. Saya memilih estetika sebaliknya. Ketika menunjukkan kekejaman Orde Baru tidak harus dalam bentuk kekerasan” (Noen, 2017).

2. Pemerintahan, Masyarakat dan Target Penonton

Pengadaptasian puisi-puisi Wiji Thukul 21 tahun pascaruntuhnya rezim Orde Baru dimaksudkan untuk mengenang ketertindasan seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak berdemokrasi rakyat yang tentu saja masih sangat kontekstual di era sekarang ini. pemilihan puisi-puisi Wiji Thukul yang dianggap relevan disesuaikan dengan kondisi demokrasi di Indonesia pada masa dikeluarkannya film tersebut. Pemilihan latar waktu film pada era pelarian Wiji Thukul dikemas sesuai dengan tujuannya untuk menggaet penonton dari berbagai macam kalangan sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa film ini hanya ditargetkan untuk masyarakat yang gemar dengan isu politik. Ujaran-ujaran demokrasi yang direpresentasikan dalam film sedang dibicarakan oleh rakyat yang apatis di kedai kopi justru malah menimbulkan kesan ‘membangkitkan’ film ini agar dapat dijangkau oleh semua kalangan penonton di Indonesia pada era reformasi ini.

Bayangkan ujaran-ujaran demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) dibincangkan oleh orang-orang apatis di sebuah kedai kopi yang harganya puluhan ribu. Impact-nya mungkin ada, entah besar atau kecil. Kami percaya betul diskusi HAM dan demokrasi bukan semata-mata ruangnya aktivis. Diskusi soal orang hilang adalah diskusi kita bersama dalam semua lini kehidupan. Justru film ini membangkitkan para penonton. Tadi malam saya berbicara dengan anak-anak muda yang masih bayi ketika terjadi peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996. Setelah menonton, mereka jadi mau belajar mengenai apa yang terjadi. (Noen, 2017).

Sebagai penutup, film adaptasi *Istirahatlah Kata-Kata* dibentuk kembali secara kontekstual untuk memperlihatkan bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dapat terjadi di masa apapun dan di segala bentuk pemerintahan apa pun. Itu lah salah satu alasan juga mengapa represi rezim Orde Baru tidak sangat kuat ditampilkan karena era tersebut sudah berlalu dan tidak sesuai dengan zamannya lagi. Akan tetapi, kejadian yang terjadi dalam film masih sejalan dengan konteks dinamika demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, film ini juga dapat menjadi refleksi atas permasalahan yang terjadi di bangsa mana pun.

Simpulan

Film “Istirahatlah Kata-Kata” menampilkan signifikansi otoritarianisme rezim Orde Baru secara implisit dan terselubung, serta memotong beberapa bagian bait puisi Wiji Thukul agar dapat digunakan sebagai kritik fenomena demokrasi secara kontekstual pada zaman post-Suharto. Film ini juga merepresentasikan Wiji Thukul sebagai tokoh yang subaltern atau dipinggirkan keberadaannya dan secara langsung menampilkan transformasi citra karakter Wiji Thukul dari seorang yang revolusioner menjadi seseorang yang bungkam dan bisu. Studi ini menawarkan pandangan baru tentang transformasi penggambaran penokohan sosok Wiji Thukul dan representasi rezim Orde baru dengan pendekatan studi adaptasi sebab penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif subjek pembuat film dan konteks zaman ketika karya adaptasi ini dibuat.

Daftar Pustaka

- Ezrow, N. M., & Frantz, E. (2011). *Dictators and dictatorships: Understanding authoritarian regimes and their leaders*. New York: Continuum.
- Gramsci, A. 2013. *Catatan-Catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gramsci, Antonio, 2000. *Sejarah dan Budaya*, Surabaya, Pustaka Prometheus.
- Gramsci, A. 1891-1937. *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. New York :International Publishers, 1971.
- Hadi, D. W. & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Verleden*. Vol. 1, No. 1, p. 40-50. Available at: < http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal%20propaganda_dwiwahyonohadi.pdf >
- Hanugrah, S. N., & Hardi, E. (2019). Melihat Penyimpangan Politik Masa Orde Baru dari Kaca Mata Karya Sastra. *Galanggang Sejarah*, 1(3), 375-393. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3514443>
- Hutcheon, L. (2006). *A theory of adaptation*. New York: Routledge.
- Lai, B., & Slater, D. 2006. Institutions of the Offensive: Domestic Sources of Dispute Initiation in Authoritarian Regimes, 1950-1992. *AJPS*. Vol. 50, No. 1, p. 113-126.
- McGlynn, John H. et al. (red.), *Indonesia in the Soeharto years; Issues, incidents and images*. Jakarta: Lontar Foundation, 2007, xxiii + 483 hlm. ISBN 979-808357-1.
- Milan W. Svobik (2012). *The Politics of Authoritarian Rule*. Cambridge University Press. pp. 22–23. Archived from the original on 2019-10-21.
- Pratikno (1998). Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokrasi. *JSP*. Vol. 2, No. 2, p. 18-33. Available at < <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11152/8392> >
- Putra, C. R. W. (2018). *Cerminan Zaman dalam puisi (Tanpa Judul) Karya Wiji Thukul*:

Kajian Sosiologi Sastra. KEMBARA: (Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra dan Pengajarannya) Vol. 4, No. 1, hlm 12-20. Available at < <https://media.neliti.com/media/publications/264629-rekam-jejak-dalam-puisi-wiji-thukul-kaji-cd28fa47.pdf> >

Ramdani, E., Martian, V., & Wuryani, W. 2018. Analisis Makna yang Terkandung dalam Puisi Karya Wiji Thukul yang Berjudul “Peringatan.” *Parole*, 1 (5), 761–766.

Riffaterre, M. 1978. *Semiotics of Poetry*. London: Indiana of University Press.

Simon, Roger, 2004. *Gagasan gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Tobing, S. 2017. “Yosep Anggi Noen: Film ini bukan jawaban tentang Wiji Thukul”. Online. Diakses 13 Oktober 2021.